



Moratorium Hotel Diperpanjang Setahun

JOGJA—Moratorium pemberian izin pembangunan hotel baru di Kota Jogja hanya diperpanjang satu tahun. Jangka waktu ini kurang sesuai dengan harapan pebisnis dan aktivis sosial.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti memperpanjang moratorium hotel baru sampai 31 Desember 2018 mendatang. Selama penangguhan pemberian izin hotel baru, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akan mengevaluasi bisnis penginapan demi menjaga citra pariwisata.

"Dari hasil evaluasi, kami masih memerlukan waktu untuk menghentikan izin pembangunan hotel baru selama setahun," kata Haryadi dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (15/12).

Alasan perpanjangan moratorium hotel yang masih di bawah target sehingga bisnis perhotelan belum sehat. Selama masa suspensi, Haryadi mengharapkan semua pengelola hotel dapat memperbaiki pola pelayanan kepada wisatawan. "Salah satunya, hotel bintang empat dan lima tidak lagi menyewakan kamar dengan harga hotel bintang satu atau dua," ujar dia.

Moratorium hanya berlaku untuk pengajuan izin hotel baru. Sementara, investor yang sudah memiliki izin atau dalam proses perizinan sebelum moratorium diberlakukan tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan proses pembangunan hotel.

• Lebih Lengkap Halaman 8

PHRI akan kembali mengusulkan moratorium hotel apabila tingkat hunian belum juga meningkat tahun depan.

Hotel-hotel yang berdampak buruk bagi lingkungan dan menimbulkan kemacetan juga mesti dievaluasi.

Instansi	
1. Din. Perizinan & PM	njut
2. Bes. Hukum	ggapi
3. Din. Pariwisata	ahui
4.	
5.	

✓ Netral

Yogyakarta, ...
Di ...

Moratorium Hotel...

"Mau renovasi juga silakan, mau mengubah bintang juga silakan," kata Haryadi.
Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (P2M) Kota Jogja, Heri Karyawan, menyatakan sejak moratorium diberlakukan Januari 2014 lalu, instansinya tidak pernah mengeluarkan izin pembangunan hotel baru.
Namun, sudah ada 104 izin hotel yang diajukan sebelum akhir 2013, ketika masa penangguhan belum diterapkan. Dari jumlah tersebut, 87 izin sudah diterbitkan sampai tahun ini.
Namun, 13 izin dibatalkan karena sampai batas waktu 1,5 tahun, izin tersebut tak segera ditindaklanjuti dengan pembangunan hotel.
"Aturannya kalau IMB [izin mendirikan bangunan] sudah keluar, tetapi bangunan tidak didirikan sampai enam bulan. Kami perpanjang lagi dua kali enam bulan. Kalau pembangunan tak juga dimulai, izin dicabut," kata Heri.
Sekarang, masih ada izin 17 hotel yang masih ditahan karena

persyaratannya belum lengkap. Namun, Dinas P2M Kota Jogja tidak bisa mencabut izin 17 hotel tersebut.
"Prinsipnya, kalau sudah memenuhi syarat, izin kami proses karena Peraturan Wali Kota tentang Moratorium Hotel tidak mengatur [pencabutan izin yang diajukan sebelum masa moratorium]," kata Heri.
Peraturan Wali Kota (Perwal) Perpanjangan Moratorium Hotel hanya mengubah waktu moratorium seperti yang tertuang dalam Perwal No.77/2013 tentang Moratorium Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel.
Kurang Sesuai
Kurun moratorium sebenarnya tak sesuai ekspektasi sejumlah kalangan. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Istidjab Damunagoro, menyambut baik keputusan Pemkot Jogja memperpanjang moratorium izin hotel, meski hanya setahun dan tidak sesuai dengan usulan tiga tahun.

"Ya, sudah cukup baik, nanti bisa dievaluasi lagi bagaimana tren kunjungan wisatawan di 2019 mendatang. Kalau masih perlu moratorium akan kami usulkan perpanjangan lagi," ujar Istidjab.
Moratorium pemberian IMB hotel anyar di Kota Jogja juga lebih singkat ketimbang Sleman yang sudah memberlakukan penangguhan hingga 2021.
Hingga saat ini tingkat hunian hotel bintang di Kota Jogja masih di bawah angka 60% dan hunian hotel nonbintang di bawah 30%. Menurut catatan PHRI, 157 hotel di provinsi ini masuk kategori hotel bintang dengan total kamar 16.739. Tahun depan hotel bintang akan bertambah sebanyak 16 unit sehingga total kamar menjadi 19.322. Sementara hotel nonbintang jumlahnya sekitar 400.
Kebanyakan hotel berbintang maupun nonbintang terpusat di Kota Jogja dan Kabupaten Sleman. Meski tingkat kunjungan ke hotel masih rendah, jumlah pelancong di Kota Jogja sangat tinggi dibandingkan dengan

Kabupaten lain di DIY. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja, Yudianto Dwisutono, mengatakan jumlah kunjungan wisatawan ke Jogja pada 2017 sudah mencapai angka tiga juta, naik 10% dibandingkan dengan kunjungan turis tahun lalu.
"Jumlah wisatawan DIY sekitar 4,5 juta," kata dia.
Kritik Sosial
Pendeknya waktu moratorium hotel juga dikritik pegiat sosial. Dodo Putra Bangsa, aktivis Warga Berdaya, yang selama ini getol menolak pembangunan hotel dengan slogan Jogja Ora Didol, menilai moratorium yang diperpanjang selama setahun tidak ada pengaruhnya. Musababnya, pada saat bersamaan masih ada belasan hotel yang mengantre untuk dibangun, yang izinya sudah masuk sebelum moratorium diberlakukan.
Agar benar-benar mengendalikan pertumbuhan hotel, kata Dodo, Wali Kota Jogja semestinya memberlakukan moratorium sampai masa jabatannya berakhir.

"Jadi kalau memang serius mau membatasi hotel, seharusnya sampai 2022," kata Dodok.
Dodo juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam pelanggaran pembangunan di Kota Jogja. Ia mencontohkan bangunan bakul hotel yang kini berubah menjadi pondokan di Jl. Timoho. Bangunan tujuh lantai dengan 90 kamar itu sempat disegel karena menyalahi aturan.
Kritik senada disampaikan kolega Dodo, Elanto Wijoyono. Pegiat sosial yang namanya beken karena mengadang arak-arakan moge dua tahun lalu itu menilai Pemkot Jogja perlu mengevaluasi keberadaan hotel yang ada sekarang, baik dari sisi dampak lingkungan, maupun dampak lalu lintasnya.
"Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup harus mengkaji itu," kata dia.
Dalam beberapa kesempatan, Elanto kerap menyoroti hotel-hotel yang tidak memiliki lahan parkir yang cukup sehingga parkir kendaraan tamu hingga memakan trotoar, bahkan sampai badan jalan. (Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005